

RENSTRA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN



**KOTA KENDARI
TAHUN 2017 - 2022**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmatnya sehingga penyusunan RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2017 – 2022 dapat di selesaikan.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari disusun sebagai acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang ketenagakerjaan dan perindustrian dalam memberikan pelayanan ketenagakerjaan dan perindustrian kepada masyarakat selama kurun waktu perencanaan tahun 2017 – 2022 dan sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari Tahun 2017 – 2022.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kemampuan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan Daerah Kota Kendari yang kita cintai ini Amin.

Kendari, 2018

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Kota Kendari

Ir. BENYAMIN SALEMPANG, M.Si
NIP. 19621106 198911 1 001

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	8
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.1.1 Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.1.2 Tupoksi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	17
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	17
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana.....	18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4 Tantang dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.....	20
2.4.1 Lingkungan Internal	21
2.4.2 Lingkungan Eksternal	21
BAB III. ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	24
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	23
3.2. Telaahan Visi Misi Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017 - 2022.....	24
3.2.1 Visi Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017 – 2022	24
3.2.1 Misi Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017- 2024.....	27
3.3 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga	33
3.4 Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan	34
3.5 Penentuan Isu-isu Strategi.....	35

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	38
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	37
BAB V. STRATEGI ARAH KEBIJAKAN	42
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	45
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	49
BAB VIII.PENUTUP	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari 2017-2022 serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah kota Kendari, serta dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kota Kendari sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik Ketenagakerjaan dan Perindustrian di Kota Kendari serta dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya, memperhatikan factor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan dan Perindustrian yang sedang berkembang.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang ketenaga Kerjaan;
14. Undang-undang Nomor.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
15. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata cara pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
24. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata cara pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

25. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 31.1/M-IND/PER/3/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015 – 2019;
26. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 Tentang Penumbuhan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui program Rekstrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan.
27. Peraturan Menteri Perindustrian No. 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Specific Duty Free Scheme Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dengan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.
28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
29. Peraturan Menteri Tenaga Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Ketenaga Kerjaan Tahun 2015-2019.
30. Peraturan menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 31.1/M-IDD/PER/3/2015 Tentang Rencana Strategis Kementrian Perindustrian Tahun 2015-2019.
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Renana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025;
33. Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraaturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 Nomor 7);

34. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari 2010 – 2030;
35. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 tahun 2012 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari tahun 2012 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Nomor tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari tahun 2017 - 2022
37. Peraturan Daerah kota Kendari no 1 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari tahun 2005 – 2025.
38. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari.
39. Peraturan Walikota Kendari Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud penyusunan renstra OPD

Sebagai penunjuk arah, pedoman dan landasan dalam pengelolaan pelayanan ketenagakerjaan dan perindustrian selama 5 (lima) tahun kedepan TAHUN 2017-2022 secara garis besar dan sebagai dasar atau pedoman dan landasan dalam menyusun dokumen rencana kerja setiap tahunnya yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah kota Kendari Tahun 2017-2022 untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Walikota Kendari.

1.3.2 Tujuan penyusunan resntra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

- Memperoleh dokumen rencana pembangunan bidang ketenagakerjaan dan Perindustrian lima tahunan yang terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kota Kendari serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan urusan ketenagakerjaan dan Perindustrian.
- Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja Kota Kendari dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yang diwujudkan dengan indikator capaian kinerja;

- Memberikan pedoman operasional bagi aparat Dinas Tenaga Kerja Kota Kendari dalam menjabarkan visi, misi, dan arah pembangunan dalam RPJMD Kota Kendari.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
 - 2.1.1 Bagan dan Struktur Organisasi Prangkat Daerah
 - 2.1.2 Tugas Prangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
 - 2.2.1 Sumber Daya Manusia
 - 2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana
- 2.3 Kinerja Pelayanan Prangkat Daerah
- 2.4 Tentang dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
 - 2.4.1 Lingkungan Internal
 - 2.4.2 Lingkungan Eksternal

Bab III. Permasalahan dan Isu-isu Strategis

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi Misi Pemerintah Kota Kendari tahun 2017-2018
 - 3.2.1 Visi Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017 - 2022
 - 3.2.2 Misi Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017 – 2022

3.3 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V. Strategi Arah Kebijakan

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA KENDARI

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

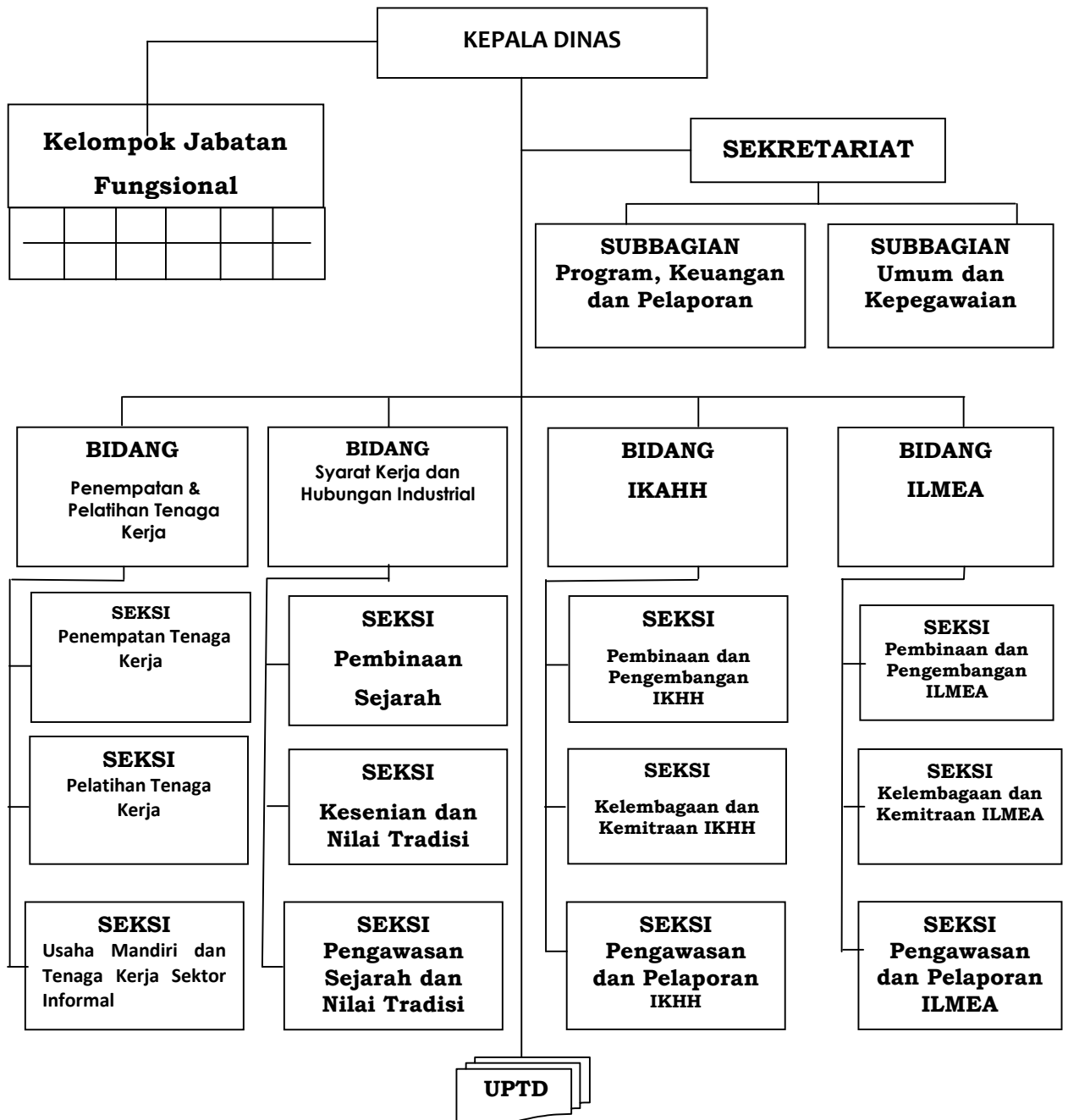
Sesuai Peraturan Walikota Kendari Nomor. 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari mempunyai Tugas membantu Walikota menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
2. Perencanaan, pengembangan dan pengawasan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan usaha di bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
4. Pelaksanaan pembinaan perizinan dan tanda daftar serta pelaksanaan pelayanan umum;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan latihan, penerapan teknologi dan penyuluhan Tenaga Kerja dan Perindustrian;
6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Tenaga Fungsional lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1. Bagan struktur organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA KENDARI



2.1.2. Tupoksi Perangkat Daerah

Berdasarkan struktur organisasi diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari 1 orang eselon II, 5 orang eselon III, 14 orang eselon IV dan Kelompok Fungsional. Adapun tugas pokok masing-masing adalah :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

2. Sekretaris

Sekretaris Dinas bertugas melaksanakan urusan administrasi umum, menyiapkan bahan koordinasi, kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan rumah tangga, pemeliharaan kantor, penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan.

Sekretaris melaksanakan fungsi :

- Pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran ;
- Penyelenggaraan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai ;
- Penyelenggaraan urusan umum meliputi kerumahtanggaan;
- Ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan;
- Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ;
- Penyusunan standar operasional prosedur ;
- Pengelolaan keuangan, asat dan pelaporan berbasis akrual ;
- Perawatan barang inventaris dan perlengkapan ; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Perencanaan Keuangan Dan Pelaporan

Sub.Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan bertugas melaksanakan penyusunan perencanaan program anggaran, pengelolaan keuangan serta penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan.

b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan urusan penyiapan bahan koordinasi antar bidang, tatausaha, kerumahtanggaan, kerjasama, kepegawaian, perjanjian kinerja, kehumasan dan protocol serta ketatalaksanaan.

3. Bidang Penempatan Dan Pelatihan Tenaga Kerja

Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja bertugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja.

Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan perencanaan kegiatan Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Berdasarkan kebijakan di bidang ketenagakerjaan ;
- Pembinaan dan pengelolaan pelatihan tenaga kerja.
- Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan terhadap pencari kerja melalui informasi pasar (bursa kerja).
- Pengkoordinasian dan pembinaan tenaga Kerja, terhadap Antar Kerja Lokal (AKAL), Antar Kerja Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Nagara (AKAN).
- Pembentukan tenaga kerja mandiri / pemula ;
- Pelaksanaan Pembinaan dan penempatan tenaga kerja pemuda dan wanita serta Penyandang cacat dan usia lanjut ; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja

Seksi Penempatan Tenaga Kerja bertugas membantu Kepala Bidang penempatan dan pelatihan Tenaga Kerja, melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Penempatan Tenaga Kerja.

b. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja

Seksi Pelatihan Tenaga Kerja bertugas membantu Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Pelatihan Tenaga Kerja.

c. Seksi Usaha Mandiri Dan Tenaga Kerja Sektor Informal

Seksi Usaha Mandiri dan Tenaga Kerja Sektor Informal bertugas melaksanakan pembinaan penempatan, pelatihan tenaga kerja sector informal.

4. Bidang Syarat Kerja Dan Hubungan Industrial

Bidang Syarat Kerja dan Hubungan Industrial bertugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang syarat kerja dan hubungan industrial.

Kepala Bidang Syarat Kerja dan Hubungan Industrial menyelenggarakan fungsi :

- Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta penyuluhan hubungan industrial ;
- Pembinaan dan pemberdayaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha ;
- Pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit dan lembaga kerjasama Tripartit dan lembaga Hubungan Industrial lainnya ;
- Pembinaan pelaksanaan jaminan social tenaga kerja di dalam dan di luar hubungan kerja ;

- Pembinaan dan pemberdayaan pekerja / buruh ;
- Pembinaan dan pemberdayaan tersedianya fasilitas kerja bagi pekerja / buruh ;
- Pembinaan pelaksanaan persyaratan kerja ;
- Pembinaan pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain ;
- Pelaksanaan survey kebutuhan layak pekerja / buruh dan pembinaan pengupahan ;
- Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial ; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

a. Seksi Syarat Kerja

Seksi syarat kerja bertugas melaksanakan pembuatan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, pembimbingan teknis, perjanjian antar perusahaan, survey kebutuhan hidup layak, fasilitasi dan pelaksanaan upah minimum.

b. Seksi Mencegah Dan Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial

Seksi Mencegah dan Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial bertugas melaksanakan pembinaan, pencegahan perselisihan hubungan industrial terhadap perusahaan kategori rawan dan setengah rawan, bimbingan teknis penyelesaian hubungan industrial, beracara di pengadilan hubungan industrial dan mekanisme mogok kerja dan penyelesaiannya, monitoring perkara perselisihan hubungan industrial dan perjanjian bersama, melaksanakan perhitungan hak pekerja setelah pemutusan hubungan kerja, pembuatan perjanjian bersama dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

c. Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Kelembagaan Hubungan Industrial

Seksi Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan Hubungan Industrial bertugas menyusun profil dan melakukan penilaian sarana hubungan industrial, bimbingan teknis hubungan industrial, teknik jamsostek di dalam dan di luar hubungan kerja, pemantauan dan evaluasi di perusahaan, pembentukan dan pelatihan teknis lembaga kerja sama Bipartit di perusahaan, fasilitasi lembaga kerjasama tripartite, pembinaan koperasi pekerja / buruh di perusahaan, memberikan pelayanan pencatatan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha dan melaksanakan verifikasi keanggotaan.

5. Bidang Industri Kimia Agro Dan Hasil Hutan

Bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) bertugas menyusun pedoman teknis pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH).

Kepala Bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan, peningkatan, pengembangan, pendalaman dan penguatan struktur Industri, iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi Industri, industry strategis dan bimbingan teknis bagi industri Mikro, Kecil dan Menengah Serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) ;
- Pelaksanaan pembinaan, pengembangan tenaga pemberdayaan potensi industri kecil dan Industri menengah, peningkatan daya saing, standardisasi dan teknologi industri, Penumbuhan wirausaha, penyuluhan lapangan, sentra dan unit pelayanan teknis, fasilitasi Industri serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri menengah Kimia, Agro, Hasil Hutan dan Hasil Laut.

- Perumusan kebijakan di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pengembangan Kawasan industri, sentra industri dan kawasan peruntukan industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan ;
 - Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pada bidang industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan ;
 - Pelaksanaan pembinaan Komoditi, pemberian bimbingan teknis dan supervise serta Fasilitasi pemberian bantuan peralatan dan promosi pada industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan ;
 - Pemberian pertimbangan Teknis untuk penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) bagi Industri Berskala Menengah, Tanda Daftar Industri (TDI) bagi Industri berskala Kecil, dan Industri Rumah Tangga (IRT) bagi Industri berskala Mikro / Home Industri pada Industri Kimia, Agro, Dan Hasil Hutan.
 - Pelaksanaan evaluasi / pengawasan dan pelaporan di bidang pengembangan dan Pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing, Standardisasi dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan Pengembangan tenaga penyuluh lapangan, sentra dan unit pelayanan teknis, serta Promosi industri dan jasa industri pada industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan di kota kendari.
 - Pelaksanaan administrasi Bidang Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan Fungsinya.
- a. Seksi Pembinaan Dan Pengembangan IKAHH
Seksi Pembinaan dan Pengembangan IKAHH bertugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH).
 - b. Seksi Kelembagaan Dan Kemitraan IKAHH
Seksi Kelembagaan dan Kemitraan IKAHH bertugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH).
 - c. Seksi Pengawasan Dan Pelaporan IKAHH

Seksi Pengawasan dan Pelaporan IKAHH bertugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH).

6. Bidang Industri Logam Mesin Elektronika Dan Aneka

Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) bertugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Industri Logam, Mesin ,Elektronik dan Aneka (ILMEA).

Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka(ILMEA) menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan Daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi Industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis, dan bimbingan teknis bagi Industri Mikro, Kecil dan Menengah, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri Pada industri logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA).
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil Dan industri menengah, peningkatan daya saing, standarisasi dan teknologi industri, Penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, serta Dan unit pelayanan teknis, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA)
- Perumusan kebijakan di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pengembangan Kawasan industri, sentra industri dan kawasan peruntukan industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria pada Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka
- Pelaksanaan Pembinaan Komoditi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi Pemberian peralatan pada Industri Logam, Mesin, Elektrinika dan Aneka

- Pemberian Pertimbangan Teknis untuk penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) bagi industri Berskala Manengah , Tanda Daftar Industri (TDI) bagi Industri berskala kecil dan Industri Rumah Tangga (IRT) bagi Industri berskala Mikro/Home Industri pada Industri Logam, Mesin Elektronika dan Aneka (ILMEA)
 - Pelaksanaan evaluasi/pengawasan dan pelaporan di bidang pembangunan dan Pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing, Standardisasi dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan Pengembangan tenaga penyuluh lapangan, sentra dan unit pelayanan teknis, Pelaksanaan fasilitasi industri serta promosi industri dan jasa industri pada Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.
 - Pelaksanaan administrasi Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA)
 - Pelaksanaan fungsi I DAN KEMITRAAN ILMEA
 - Seksi Kelembagaan dan Kemitraan ILMEA bertugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA).
- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan ILMEA
Seksi Pembinaan dan Pengembangan ILMEA Bertugas membantu kepalabidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang Industri, Logam, Mesin, Elctronika dan Aneka (ILMEA)
 - b. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan ILMEA
Seksi kelembagaan dan kemitraan ILMEA bertugas membantu kepala bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA)
 - c. Seksi Pengawasan dan Pelaporan ILMEA
Seksi Pengawasan dan Pelaporan ILMEA bertugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- Fungsional Mediator
- Fungsional Pengantar Kerja

2.2. Sumber daya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas tenaga kerja dan perindustrian kota kendari memiliki sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya sarana dan prasarana kerja

2.2.1 Sumber daya Manusia

Dari sisi sumber daya kepegawaiaan, sampai dengan kondisi Desember 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari memiliki pegawai sebanyak 37 orang yang terdiri atas 33 orang struktural dan 4 orang fungsional. Jabatan Struktural yang tersedia sebanyak 20 jabatan dan telah terisi sebanyak 20 jabatan. Berikut rincian jumlah pegawai yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari per 31 Desember 2017 :

- Sekretariat sebanyak 5 orang
- Urusan Tenaga Kerja sebanyak 20 orang
- Urusan Perindustrian sebanyak 12 orang

Tabel 1

Tabel sumber daya manusia berdasarkan jabatan, pendidikan, golongan, dan jenis kelamin.

No	Jabatan	Jumlah	Pendidikan	Gol	Jenis Kelamin
1.	Kepala Dinas	1	S2	IV/c	L
2	Sekretaris	1	S2	IV/b	L
3.	Kabid Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja	1	S1	IV/a	L
4.	Kabid Syarat Kerja dan Hubungan Industrial	1	S2	IV/a	L
5.	Kabid Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan	1	S1	IV/a	P
6.	Kabid Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka	1	S2	III/d	L
7.	Kasub.Bag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	S1	III/d	P
8.	Kasub.Bag. Umum dan Kepegawaian	1	S1	III/d	P

9.	Seksi Panempatan Tenaga Kerja	1	S1	III/b	P
10.	Seksi Pelatihan Tenaga Kerja	1	S1	III/d	L
11.	Seksi Usaha Mandiri dan Tenaga Kerja sector Informal	1	S1	III/c	L
12.	Seksi Syarat Kerja	1	S2	III/d	L
13.	Seksi Mencegah dan menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial	1	S2	III/d	L
14.	Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Hubungan Industrial	1	S1	III/c	L
15.	Seksi Pembinaan dan Pengembangan IKAHH	1	S2	III/d	P
16.	Seksi Kelembagaan dan Kemitraan IKAHH	1	S1	III/d	L
17.	Seksi Pengawasan dan Pelaporan IKAHH	1	S1	III/c	L
18.	Seksi Pembinaan dan Pengembangan ILMEA	1	S1	III/d	L
19.	Seksi Kelembagaan dan Kemitraan ILMEA	1	S2	III/b	P
20.	Seksi Pengawasan dan Pelaporan ILMEA	1	S1	III/b	L
21.	Fungsional Mediator	1	S1	III/b	L
22.	Fungsional Pengantar Kerja	1	S1	III/b	L
23.	Staf PNS	9	S1/S2	III,IV	L
24.	Staf PNS	7	SLTA/S1	II,III	P
25.	Staf Non PNS	7	S1	--	L/P
Jumlah		45			

Tabel 2
Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin

No	Uraian	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Pembina Gol IV	7	1	8
2.	Pembina Gol III	17	10	27
3.	Pengatur Gol II	--	1	1
4.	Juru Gol I	--	2	2
5.	Non PNS	4	3	7
Jumlah		28	17	45

2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia, Dinas Tenaga Kerja dan perindustrian Kota kendari juga memiliki asset modal dan unit usaha yang masih operasional, berupa : sarana dan prasarana kerja untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat. Berikut ini adalah bagan rekapitulasi infentaris barang Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari.

Tabel 3
Daftar Infentaris barang Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota Kendari

No	Nama Infentaris	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Sedang	Rusak	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gedung Kantor	1	-	-		Pinjam Pakai
2.	Mobil	1	-	-		Pinjam Pakai
3.	Motor	1	-	-		
4.	Meja Biro	4	-	-	-	
5.	Meja ½ Biro	9	-		-	
6.	Kursi Biro	4	-		-	
7.	Kersi Futura	10	-		-	
8.	Komputer	2	-		-	
9.	Printer	1	-		-	
10.	Ac	1	-		-	
11.	Mesin Absen	1	-		-	

Infentaris yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari ini diharapkan dapat menunjang para aparatur untuk meningkatkan kinerja dan menjadi faktor pendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan pemenuhan infentaris yang telah dilakukan pembaruan dapat dilihat kondisi dinas sendiri untuk nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam melihat kondisi instansi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari mempunyai layanan kemasyarakatan yaitu layanan dibidang hubungan industrial dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari telah

menyelesaikan kasus perselisihan hubungan industrial tahun 2016 yang sudah diselesaikan adalah sebanyak 56 (lima puluh enam) kasus yang mana kasus ini mencakup indikator : pemohon sebagai tenaga kerja, termohon sebagai pihak perusahaan, tanggal pencatatan pengajuan gugatan, tanggal pelimpahan siding mediasi I, siding mediasi II, dan siding mediasi III. Dan hasil siding mediasi, dari 56 kasus yang telah diselesaikan, jumlah tenaga kerja yang di PHK, yang bermohon keberatan terhadap pihak perusahaan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) orang, dan melibatkan 56 perusahaan yang ada di kota kendari dengan penyelesaian kasus 98% (Sembilan puluh delapan) persen.

Berdasarkan data registrasi bidang perindustrian Dinas Tenaga Kerja dan perindustrian Kota Kendari, pertumbuhan industri mikro, kecil dan menengah tahun 2016 sebesar 22,42 % untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM), 28,22 % untuk Tenaga Kerja (TK), 24,58 % untuk Investasi, dari data tersebut dapat di lihat pada table sebagai berikut :

2.3.1 Evaluasi Pencapaian Kinerja Lima Tahun yang Lalu

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Kendari

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja formal								18%					18%					100%
2	Persentase jumlah kasus ketenagakerjaan yang terselesaikan								12%					12%					100%
3	Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif								15%					15%					100%

Kendari, Januari 2018

Kepala
Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian
Kota Kendari

Ir.BENYAMIN SALEMPANG M.Si
Nip. 19621106 198911 1 001

Tabel T-C. 24
Anggaran dan Realisasi Pandangan Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Kendari

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata- rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Agaran APBD T.A 2018					2,661,532,000					2,609,381,801					1,02	2,661,532,000	98,98

Kendari, Januari 2018

Kepala
Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian
Kota Kendari

Ir.BENYAMIN SALEMPANG M.Si
Nip. 19621106 198911 1 001

2.3.2. Indikator Kinerja OPD (SPM Atau MDG's atau Indikator Mandiri)

Menyebutkan indikator-indikator yang telah digunakan sesuai dengan MDG's, SPM, atau Indikator Mandiri

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari

Rencana Strategis adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap, pada akhirnya akan membawa instansi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan Visi Misi. Sehingga untuk mencapai tujuan akhir tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari harus menganalisa 4 (empat) factor yaitu : Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Kesempatan (Opportunity), Ancaman (Threats) yang dihadapi melalui sector tenaga kerja dan perindustrian. Untuk menganalisa ke empat factor tersebut dibutuhkan analisa SWOT.

Analisa SWOT adalah indikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strength), kelemahan (weakness), kesempatan (opportunity), dan ancaman (threats) dan analisa SWOT dibutuhkan untuk menentukan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari untuk 5 (lima) tahun kedepan, dan hal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sector tenaga kerja dan sector perindustrian kota Kendari.

2.4.1. Lingkungan Internal

Kekuatan (S)

- a. Kewenangan di bidang ketenaga kerjaan dan perindustrian ;
- b. Adanya peraturan perundang-undangan, sistem administrasi dan management ketenaga Kerjaan dan perindustrian serta mekanisme kerja yang sudah ada ;

- c. Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia dibidangnya ;
- d. Tersedianya anggaran dan SOP layanan.

Kelemahan (W)

- a. Jaringan sistem Informasi online ketenagakerjaan dan perindustrian belum ada;
- b. Terbatasnya sumberdaya manusia di bidang teknis ketenagakerjaan dan di bidang teknis Perindustrian
- c. Sarana dan prasarana penunjang kerja seperti: gedung kantor, dan fasilitas penunjang Lainnya belum memadai ;
- d. Anggaran yang sangat terbatas ;
- e. Kurangnya tenaga fungsional di bidang tenaga kerja ;

2.4.2. Lingkungan Eksternal

- a. Peluang (O)
 - 1. Tersedianya mitra kerja yang professional ;
 - 2. Tersedianya lembaga latihan swasta yang memadai ;
 - 3. Meningkatnya partisipasi tenaga kerja ;
 - 4. Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja ;
 - 5. Banyaknya organisasi ketenagakerjaan ;
 - 6. Sarana dan prasarana pendukung seperti letak geografis, pelabuhan, bandara dan Kawasan industri.
- b. Ancaman (T)
 - 1. Tingginya angkatan kerja yang mencari pekerjaan ;
 - 2. Kurangnya tingkat keterampilan tenaga kerja ;
 - 3. Kualitas dan kuantitas perselisihan hubungan industrial yang tinggi ;
 - 4. Kurangnya kesadaran perusahaan atau pekerja akan pentingnya keselamatan dan Kesehatan kerja serta peraturan perundangan tentang tenaga kerja
 - 5. Tuntutan upah minimum kerja (UMK) yang sangat tinggi, serta tingginya pelanggaran Norma dan sysrat kerja ;
 - 6. Sumber daya alam yang terbatas menyebabkan tingkat ketergantungan bahan baku Industri pengolahan sangat tinggi.

BAB III.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari adalah :

Sektor Tenaga Kerja.

- Terbatasnya aparatur teknis bidang tenaga kerja,-
- Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja tidak sesuai peluang pasar kerja,-
- Kurangnya sarana dan prasarana latihan yang memadai,-
- Meningkatnya permasalahan ketenaga kerjaan di bidang hubungan industrial masalah hak dan kepentingan,-
- Masih banyaknya perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya di Jamsostek,-
- Masih tingginya pelanggaran norma kerja dan norma K3.

Sektor Industri

- Masih adanya ketergantungan terhadap bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponen dari luar daerah,-
- Struktur Industri masih di dominasi Industri skala kecil yang mengelola produk berbasis bahan baku lokal dan menggunakan produk sederhana,-
- Masih lemahnya peranan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam sektor perekonomian.-
- Masih rendahnya kualitas dan daya saing produk IKM yang dihasilkan,-
- Masih terbatasnya akses industri kecil pada sumber bahan baku, permodalan, teknologi, dan pasar,-
- Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan dan monitoring secara berkelanjutan terhadap pelaku usaha industri.

3.2 Telaahan Visi Misi Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017 – 2022

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat (*Community development*) sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, tanpa peran yang optimal dari pemerintah, pembangunan akan berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah, yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis. Berdasarkan hal ini maka untuk mengukur tingkat capaian pembangunan tersebut diperlukan visi dan misi. Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka Visi dan misi adalah merupakan gambaran apa yang ingin dicapai Kota Kendari pada akhir periode kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih, yaitu:

3.2.1 Visi Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017 – 2022

Perubahan ditengah-tengah jumlah penduduk yang terus bertambah membawa tuntutan untuk meningkatkan daya dukung kota secara berkelanjutan, karakteristik penduduk yang terus mengalami dinamika, derajat sumberdaya manusia yang harus terus didukung oleh peningkatan kualitas lingkungan kota, pertumbuhan ekonomi yang harus diimbangi dengan penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing dikawasan regional dan internasional, peningkatan partisipasi masyarakat, reformasi birokrasi serta peningkatan aksesibilitas, kapasitas dan kualitas pelayanan publik yang merupakan tiga tantangan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian bahwa suksesnya suatu pembangunan bukan karena cepatnya suatu proses pelaksanaan, tetapi tepatnya model strateginya, dan cepatnya identifikasi masalah. Namun

demikian yang utama dari hakekat pembangunan adalah pendayagunaan potensi masyarakat semaksimal mungkin dengan jalan partisipatif aktif menurut tingkat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan Visi yang memiliki makna strategis dan cerminan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat.

Visi Kota Kendari yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun ke depan menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

**“MEWUJUDKAN KOTA KENDARI KOTA LAYAK HUNI YANG
BERBASIS
EKOLOGI, INFORMASIDAN TEKNOLOGI”**

Makna dalam visi tersebut adalah :

Kota Layak Huni adalah kondisi yang menggambarkan Kota Kendari, dimana masyarakat dapat hidup dengan nyaman, tenang, makmur, sehat, aman, selamat dan damai dalam suatu kota serta dapat memberikan kesempatan bagi seluruh kegiatan masyarakat kota dengan sistem ekologi.

Berbasis ekologi adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan Kota Kendari dengan menciptakan kota yang selaras, serasi dengan alam dan lingkungannya melalui penataan ruang yang dapat mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana serta melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.

Informasi dan Teknologi menunjukkan bahwa Kota Kendari sebagai kota yang menerapkan teknologi informasi didalam aktivitas pembangunan dan akan selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat kota yang semakin kompleks dan bervariasi agar efisiensi, efektif dan transparan melalui pelayanan pemerintah secara elektronis (e-Government) serta

peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi telematik.

Penjabaran visi Kota Kendari selama lima tahun ke depan dituangkandalam Tabel V.1 di bawah ini.

Tabel V.1
Perumusan Penjelasan Visi

VISI	Pokok- Pokok Visi	Penjelasan Visi
MEWUJUDKAN KOTA KENDARI KOTA LAYAK HUNI YANG BERBASIS EKOLOGI, INFORMASI DAN TEKNOLOGI	Kota Layak Huni	Kondisi yang menggambarkan Kota Kendari, dimana masyarakat dapat hidup dengan nyaman, tenang, makmur, sehat, aman, selamat dan damai dalam suatu kota serta dapat memberikan kesempatan bagi seluruh kegiatan masyarakat kota dengan sistem ekologi
	Berbasis Ekologi	Prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan Kota Kendari dengan menciptakan kota yang selaras, serasi dengan alam dan lingkungannya melalui penataan ruang yang dapat mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana serta melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman

VISI	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		yang ramah lingkungan.
	Informasi dan Teknologi	Menunjukkan bahwa Kota Kendari sebagai kota yang menerapkan teknologi informasi didalam aktivitas pembangunan dan akan selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat kota yang semakin kompleks dan bervariasi agar efisiensi, efektif dan transparan melalui pelayanan pemerintah secara elektronik (e-Government) serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi telematik.

3.2.2 Misi Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017 – 2022

Mewujudkan visi Kota Kendari dijabarkan kedalam 3 (tiga) misi pembangunankotaberikut, dandijelaskanpadaTabel V.2.

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
2. Menata wajah Kota Kendari
3. Pembangunan Infrastruktur

Tabel V.2
Perumusan Penjelasan Misi

No	Pokok-Pokok Visi	Misi/Sub-misi	Penjelasan Misi
	Kota Layak Huni	Misi 1: Meningkatkan	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta ketahanan

No	Pokok-Pokok Visi	Misi/Sub-misi	Penjelasan Misi
		kualitas pelayanan masyarakat	pangan
			Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda
			Meningkatkan kompetensi angkatan kerja
			Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat, meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama
			Meningkatkan upaya penanganan PMKS dan memberdayakan keluarga miskin serta pemberdayaan kelompok usia produktif dengan melibatkan peran serta swasta melalui upaya untuk meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS serta pemberdayaan keluarga miskin
			Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

No	Pokok-Pokok Visi	Misi/Sub-misi	Penjelasan Misi
			Mewujudkan penggalian dan penguatan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial
			Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca
			Menggali potensi, peningkatan investasi, serta mengembangkan dan menerapkan konsep <i>logistik</i> yang terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skala regional, nasional, maupun internasional
			Menghubungkan simpul-simpul yang menjadi jaringan aktivitas perdagangan
			Mempermudah akses yang dapat menjalin hubungan baik antara pemangku kepentingan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan, industri
			Meningkatkan daya saing dan aktivitas ekonomi berbasis komunitas
			Meningkatkan kinerja investasi dan Pariwisata

No	Pokok-Pokok Visi	Misi/Sub-misi	Penjelasan Misi
			Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh regulasi dan sistem informasi pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas
			Meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, dengan cara memantapkan proses dan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang didukung TIK
			Meningkatkan pelayanan publik yang menggunakan IT yang prima pada semua unit pelayanan dan SKPD
			Meningkatkan kemandirian keuangan daerah, dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien
	Berbasis Ekologi	Misi 2: Menata wajah Kota Kendari	Mewujudkan sinkronisasi dan keberlanjutan (sustainability) sistem pertanahan dan sistem penataan ruang
			Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota

No	Pokok-Pokok Visi	Misi/Sub-misi	Penjelasan Misi
			Mewujudkan sistem mitigasi bencana di kawasan perkotaan yang terintegrasi, melalui upaya mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap serta didukung dengan prasarana dan sarana yang berkualitas
			Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan
			Meningkatkan Efisiensi penggunaan tanah dengan mempertimbangkan proporsi lahan terbuka hijau tetap terjaga
			Memperindah Kota Kendari yang dimulai dari setiap kelurahan
	Informasi dan Teknologi	Misi 3: Pembangunan Infrastruktur	Optimalisasi kinerja sistem drainase kota yang berfungsi dengan cara menyediakan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien
			Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terintegrasi

No	Pokok-Pokok Visi	Misi/Sub-misi	Penjelasan Misi
			Mewujudkan pengembangan sistem angkutan massal cepat perkotaan Kendari secara terpadu dan terintegrasi antar moda yang disertai dengan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum
			Mewujudkan pembangunan dan pengembangan utilitas kota secara terpadu dan merata dengan cara menyediakan pelayanan air bersih/air minum bagi masyarakat
			Mewujudkan pembangunan dan pengembangan utilitas penerangan jalan umum (PJU) kota secara terpadu dan merata dengan cara menyediakan prasarana, sarana dan sistem jaringan utilitas penerangan jalan umum kota yang berkualitas
			Mewujudkan peningkatan pelayanan dan sistim jaringan utilitas kota seperti gas, telekomunikasi dan listrik
			Mewujudkan keabsahan kepemilikan aset untuk dimanfaatkan pembangunan sarana dan prasarana kota, dengan cara mewujudkan pemanfaatan tanah dan atau bangunan Pemerintah Kota untuk kepentingan umum

No	Pokok- Pokok Visi	Misi/Sub-misi	Penjelasan Misi
			Menyediakan rumah tempat tinggal yang layak huni dan dilengkapi dengan sarana prasana yang memadai serta didukung dengan lingkungan yang sehat secara berkelanjutan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Analisis Renstra K/L dan SKPD Kota Kendari ditujukan untuk menilai kesesuaian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD.

Hal tersebut di atas perlu perbaikan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kualitas tenaga kerja dan perindustrian dan perlu juga di lakukan peningkatan akses tenaga kerja dan perindustrian kepada sumber daya produktif, kompetensi dan produktifitasnya.

a. Sasaran Strategis Kementrian Perindustrian.

- a. Meningkatkan Industri yang kuat.
- b. Bertambahnya investasi di industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja.
- c. Meningkatkan investasi dan kegiatan pengolahan Sumber Daya Alam di daerah sehingga Produk Sumber Daya Alam tidak di jual dalam kondisi bahan mentah.
- d. Semakin lengkap dan dalamnya pohon industri.
- e. Meningkatnya penguasaan pasar luar negeri.
- f. Kokohnya factor-faktor penunjang pengembangan industri.

- g. Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB.

b. Sasaran Strategis Kementerian Tenaga Kerja.

- a. Meningkatnya daya saing dan produktifitas tenaga kerja.
- b. Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- c. Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan Industrial.
- d. Meningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan di Tempat kerja.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. RTRWK berfungsi sebagai ; penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, provinsi dan kota; serta acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Daerah dan masyarakat untuk menyerahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota Kedudukan RTRWK/ yaitu sebagai pedoman bagi :

- Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota dan rencana sektoral lainnya.
- Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota.
- Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antara sector daerah dan Pemangku kepentingan.
- Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dan
- Penataan ruang kawasan strategis kota.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan salah satu dokumen yang menjadi pedoman, disamping adanya dokumen lain. Dengan demikian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari yang disusun dengan memperhatikan RPJMD tentu saja tidak lepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah.

Untuk mewujudkan visi penataan ruang tersebut, maka lebih lanjut dirumuskan misi sebagai berikut :

- Mewujudkan keseimbangan pertumbuhan wilayah di Kota Kendari.
- Mewujudkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi di Kota Kendari.
- Meningkatkan sarana dan prasarana/infrastruktur kota yang menjamin aksesibilitas public,berwawasan lingkungan.
- Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat kota Kendari.
- Mewujudkan pemantapan fungsi lindung dan optimasi fungsi budidaya diseluruh wilayah kota Kendari.
- Meningkatkan akses, kesadaran, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pengembangan wilayah kota Kendari.
- Mewujudkan berbagai kemudahan bagi pengembangan investasi serta peningkatan kerja sama Regional
- Mewujudkan integrasi program pembangunan yang didukung seluruh pemangku kepentingan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Sebelum menentukan Isu-Isu Strategis ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis seperti Gambaran Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari merupakan salah satu SKPD di kota Kendari yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti pembuatan kartu pencari kerja atau kartu K3, mediasi perselisihan hubungan industrial antara pihak perusahaan dan pihak pekerja atau buruh perusahaan, penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) bagi industri berskala menengah, penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) bagi Industri berskala Kecil, dan Industri Rumah Tangga (IRT) bagi Industri berskala Mikro/Home Industri. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan, serta Isu-isu Strategis yang dapat di angkat adalah :

1. Urusan Ketenaga Kerjaan

- a. Meningkatkan penyelesaian perselisihan hubungan industriasi.
- b. Melibatkan partisipasi masyarakat.
- c. Optimalisasi informasi lowongan kerja, dan tindak lanjut dari program yang telah dijalankan.
- d. Optimalisasi dengan perusahaan penerima tenaga kerja.
- e. Tingkatkan informasi lowongan kerja.
- f. Tingkatkan keterampilan tenaga kerja.
- g. Memperluas kesempatan kerja dan berusaha.

BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang diberi mandat oleh undang-undang sebagai penyelenggara kewenangan otonomi daerah dibidang ketenaga kerjaan dan perindustrian selalu dituntut untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan pembangunan dapat dirumuskan dan dicapai secara efektif dan efisien, eksistensi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari yang efektif dan efisien di masa depan, akan banyak di tentukan oleh kemampuannya dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program-program ketenagakerjaan dan perindustrian. Ini berarti bahwa pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan perindustrian sebagai bagian dari keseluruhan proses pembangunan daerah.

Salah satu langkah dalam manajemen pada umumnya, dan juga manajemen pembangunan ketenaga kerjaan dan perindustrian adalah perumusan visi organisasi agar setiap anggota didalamnya memahami arah dan tujuan yang akan dicapai bersama-sama. Pernyataan Visi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari akan dapat membantu menilai kinerja dan mengidentifikasi berbagai langkah penting untuk dilakukan dimasa depan. Visi diharapkan akan membangkitkan motivasi kerja secara kolektif, karena setiap orang dalam organisasi akan memahami tujuan-tujuan untuk lima tahun yang akan datang.

Pernyataan Visi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari diharapkan mampu menciptakan consensus dari setiap stakeholders sehingga mereka memiliki komitmen yang tinggi dan mencurahkan segala daya dan kemampuan demi tercapainya cita-cita organisasi khususnya dan pembangunan masyarakat kota Kendari pada umumnya. Disamping itu pernyataan visi dapat diciptakan kesadaran kolektif diantara seluruh pejabat dan pegawai tentang pentingnya pencapaian kondisi ideal yang diinginkan dan dirumuskan secara bersama.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Penetapan tujuan didasarkan kepada factor-faktor lingkungan strategis sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kota kendari. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan

menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan. Berdasarkan uraian tersebut, penjabaran Visi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah kota Kendari.

Tujuan

- a. Menyediakan tenaga kerja yang kompeten produktif sesuai dengan perkembangan pasar Kerja dan meningkatnya profesionalismenya, kepelatihan serta menciptakan wira usaha Baru.
- b. Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan penciptaan lapangan kerja.
- c. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis berkeadilan guna meningkatkan Kesejahteraan tenaga kerja dan pelayanan penyelesaian khusus pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam upaya melaksanakan perlindungan tenaga kerja
- d. Menumbuhkan sector industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.
- e. Meningkatkan daya saing industri kecil menengah kota Kendari.
- f. Mewujudkan kualitas kinerja yang efektif, efisien, dan profesionalisme sumber daya

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu, dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kualitatif sehingga dapat di ukur.

Adapun sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari yang ingin di capai adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan sumber daya manusia tenaga kerja.
- b. Peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- c. Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja
- d. Peningkatan wira usaha baru.
- e. Peningkatan kegiatan industri berbasis sumber daya local.
- f. Penciptaan tata kelola organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel.

beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.2

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke				
				1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	1.5. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran	1.5.1. Meningkatkan Pemenuhan Kesempatan Kerja Bagi Angkatan Kerja	Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja formal	20%	22%	24%	26%	28%
		1.5.2. Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis	Persentase jumlah kasus ketenagakerjaan yang terselesaikan	14%	16%	18%	20%	22%
2..	Tujuan 1.13. Mendorong pementapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif	Sasaran 1.13.5. Meningkatkan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	Tingkat Pertumbuhan Pelaku Usaha Kreatif	15,5%	16%	16,5%	17%	17,5%

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional, komprehensif. Strategi yang tercantum dalam rencana pembabagunan jangka menengah RPJM tahun 2017-2022 yang berkaitan dengan urusan tenaga kerja dan perindustrian untuk mencapai arah kebijakan adalah sebagai berikut :

Tabel T-C 26
Tujuan, Sasaran, strategi, dan Kebijakan

Visi : mewujudkan kota kendari kota layak huni yang berbasis ekologi, informasi dan teknologi			
Misi : Meningkatkan Kompetensi angkatan kerja			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1.5 Meningkatkan Kompetensi Angkatan Kerja Untuk Mengurangi Pengangguran	1 Sasaran 1.5.1 Meningkatkan Kesempatan Kerja Bagi angkatan Kerja	1 Strategi 1.5.1.1 Memperluas Kesempatan Kerja Formal	1 Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi 2 pengembangan sistem informasi dan promosi tenaga kerja yang terintegrasi dan efektif 3 Peningkatan Pelayanan penempatan kerja, Konseling dan job matching yang tepat 4 Fasilitas Kerjasama lembaga pendidikan, pelatihan dan pemberi kerja
		2 Strategi 1.5.1.2 Menumbuhkan wirausaha muda produktif	1 Pelaksanaan pelatihan wirausaha muda baru yang produktifitas
		3 Strategi 1.5.1.3 Meningkatkan Kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	1 Sertifikasi tenaga kerja dan lulusan pelatihan 2 Fasilitas akreditasi lembaga pelatihan 3 Masyarakat budaya produktif dan etos kerja
		4 Strategi 1.5.2.4 Meningkatkan Peran industri kecil dan menengah (IKM)	1 Pengembangan Industri kecil, menengah 2 Pembinaan Pengrajin 3 Pembinaan industri rumah tangga
	2 Sasaran 1.5.1 Menciptakan hubungan antar kepentingan dan lingkup industri yang harmonis	1 Strategi 1.5.2.5 Menerapkan prinsip-prinsip hubungan industri dalam pemecahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industri	1 Mendorong perusahaan milik pemerintah kerja dan mengawasi penerapannya 2 Mendorong terwujudnya penetapan upah dan skala upah yang adil
		2 Strategi 1.5.2.1 Meningkatkan penerapan norma kerja terhadap cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	1 Peningkatan cakupan norma kepesertaan jaminan ketenagakerjaan
Tujuan 1.13 Mendorong penguatan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif	3 Sasaran 1.13.5 Meningkatkan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	1 Strategi 1.13.5.1 Mengembangkan pusat-pusat desiminasi teknologi dan informasi dan pendampingan untuk pengembangan ekonomi kreatif	1 Pemanfaatan fasilitas publik sebagai pusat desiminasi teknologi, informasi, dan pendampingan dalam pengembangan ekonomi kreatif masyarakat kota
		2 Strategi 1.13.5.2 Mengembangkan kemampuan teknologi industri	1 Peningkatan kemampuan teknologi industri

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program kerja dan kegiatan merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah untuk menjabarkan kegiatan. Sedangkan kegiatan operasional merupakan penjabaran dari program. Penjabaran program ini meliputi tingkat kerincian yang disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana diuraikan dalam kebijakan.

Penyusunan program dan kegiatan disesuaikan dengan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari. Program ini dilengkapi dengan indikator terukur dalam pencapaian hasilnya.

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan (Honorarium Non PNS)
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- g. Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- i. Penyediaan makanan dan minuman
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Peralatan Elektronik
- b. Pembangunan Gedung Kantor
- c. Pembangunan Pagar Kantor
- d. Penataan Halaman Kantor
- e. Pengadaan Kendaraan dinas Operasional

- f. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- g. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- h. Pengadaan Meubeler
- i. Pengadaan computer+attachment
- j. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- k. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor.
- l. Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor

C. Program peningkatan disiplin aparatur

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan

D. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- a. Pendidikan dan pelatihan formal
- b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

E. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan laporan keuangan SKPD
- c. Penyusunan rencana strategis SKPD
- d. Penyusunan rencana kinerja tahunan

F. Program promosi pembangunan dan informasi daerah

- a. Pameran pembangunan

G. Program peningkatan kualitas dan produktifitas kerja

- a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

H. Program peningkatan kesempatan kerja

- a. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
- b. Pelayanan antar kerja dan penyebaran informasi pasar kerja
- c. Pemberian fasilitas dan penciptaan kesempatan kerja
- d. Wirausaha bagi tenaga kerja disabilitas

- e. Wirausaha bagi tenaga kerja lansia
- f. Wirausaha bagi tenaga kerja muda
- g. Padat karya infrastruktur
- h. Padat karya produktif
- i. Pemberdayaan tenaga kerja mandiri
- j. Pelatihan penciptaan lapangan kerja/lapangan usaha

I. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

- a. Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- b. Sosialisasi penetapan upah minimum dan upah minimum sektoral kota kendari
- c. Bimbinganteknis tata cara pembuatan perjanjian kerja penyusunan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama
- d. Sosialisasi peraturan dan Perundang-undangan ketenagakerjaan.

J. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas

- a. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja

K. Program pengembangan industri kecil dan menengah (IKM)

- 1. Pendataan dan pemetaan usaha industry Bidang ILMEA
- 2. Pembinaan dan fasilitas usaha industry kecil menengah Bidang ILMEA
- 3. Pembinaan dan pemberdayaan industry kerajinan perak
- 4. Pembinaan dan pemberdayaan industry kerajinan tenun
- 5. Pelatihan penjahitan
- 6. Pembinaan dan pemberdayaan IKM bantuan mesin jahit
- 7. Survey dalam rangka pemberian rekomendasi perizinan Bidang ILMEA
- 8. Monitoring dan Evaluasi Bidang ILMEA
- 9. Promosi Produk Industri Kecil Menengah
- 10. Pelatihan teknis pengelolaan usaha industri/assessment motivation training (AMT) Bidang ILMEA

11. Pelatihan creation of enterprises formation of enterpreneuse (Cefe)
12. Survey dalam rangka pemberian rekomendasi perizinan Bidang IKAHH
13. Pendataan dan pemetaan usaha industri Bidang IKAHH
14. Pembinaan dan fasilitas industry IKM Bidang IKAHH
15. Pembinaan dan pemberdayaan industry Bidang IKAHH
16. Pembinaan IKM dalam rangka lomba kelurahan dan P2WKSS
17. Pelatihan diversifikasi industry pangan IKM Bidang IKAHH
18. Pelatihan dan pemberdayaan IKM meubeleur dan Produk Kayu Bidang IKAHH
19. Pelatihan pengembangan kemasan dan label IKM Bidang IKAHH
20. Pelatihan kewirausahaan berbasis industri rumah tangga Bidang IKAHH
21. Monitoring dan evaluasi Bidang IKAHH

K. Program pengembangan sentra sentra industri potensial

- a. Rencana pembangunan industry Kota (RPIK)
- b. Pembangunan Sentra-sentra IKM
- c. Pengelolaan Sentra – sentra IKM
- d. Pembuatan naskah akademik dan penyusunan peraturan daerah serta peraturan walikota tentang industry
- e. Sosialisasi peraturan-peraturan tentang industry

L. Program peningkatan kemampuan teknologi industri

- a. Pembinaan kemampuan teknologi industri bidang IKAHH
- b. Pembinaan dan fasilitasi penerapan inovasi teknologi industri Bidang IKAHH
- c. Pembinaan dan fasilitasi pengembangan teknologi industri dibidang ILMEA
- d. Pembinaan dan fasilitas penerapan inovasi teknologi industry dibidang ILMEA

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai indicator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran RPJMD seperti pada table berikut :

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	100%	3%	17%	22%	27%	31%	100%
2.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0%	0%	19%	22%	27%	32%	100%
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis masyarakat	0%	0%	19	22%	27%	32%	100%
4.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0%	14%	16%	19%	23%	28%	100%
5.	Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja formal	88%	0%	22%	24%	26%	28%	100%
6.	Besaran pekerja buruh yang menjadi peserta program jam sostek	40%	0%	22%	24%	26%	28%	100%
7.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	100%	7%	7%	26%	28%	32%	100%
8.	Persentase jumlah kasus ketenaga	100%	14%	17%	18%	22%	29%	100%

	kerjaan yang terselesaikan							
9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0%	0%	22%	24%	26%	28%	100%
10.	Cakupan bina kelompok pengrajin	100%	0%	19%	22%	27%	32%	100%
11	Persentase IKM yang terbina	100%	7%	4%	23%	31%	35%	100%
12.	Persentase sentra industri yang dikembangkan	0%	0%	25%	25%	25%	25%	100%
13.	Persentase industri yang mempunyai kemampuan teknologi industri	0%	0%	18%	23%	27%	32%	100%

BAB VIII PENUTUP

Rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan perindustrian Kota Kendari, tahun 2017-2022 yang bervisi misi ,tujuan dan arah kebijakan yang di implementasikan kedalam program dan kebijakan adalah merupakan pedoman bagi aparat dinas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan dan perindustrian dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2017-2022 juga menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Dengan mendukung terlaksananya program pemerintah kota dalam mewujudkan dan melaksanakan Visi kota Kendari “ MEWUJUDKAN KOTA KENDARI KOTA LAYAK HUNI YANG BERBASIS EKOLOGI, INFORMASI DAN TEKNOLOGI” Mengandung arti bahwa kondisi yang menggambarkan kota Kendari, dimana masyarakat dapat hidup dengan nyaman, tenang, makmur, sehat, aman, selamat dan damai dalam suatu kota serta dapat memberikan kesempatan bagi seluruh kegiatan masyarakat dengan berbasis sistem ekologi, informasi dan teknologi. Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari disusun sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dalam rangka mendorong peningkatan mutu pelayanan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian. Dan kami ucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung sehingga tersusunnya Renstra ini.

Kendari, 2017

**Kepala
Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian
Kota Kendari**

Ir.BENYAMIN SALEMPANG M.Si

Nip. 19621106 198911 1 001

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari
Kota Kendari

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022						
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	13%	352,860,000	15%	389,887,000	20%	521,153,500	25%	652,163,550	32%	848,049,955	104%	2,649,779,765			
								a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	100%	12 Bln	5,000,000	12 Bln	6,000,000	12 Bln	7,200,000	12 Bln	8,640,000	12 Bln	10,368,000	60 Bln	37,208,000	Sekrt.	KDI
								b Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	12 Bln	18,660,000	12 Bln	52,392,000	12 Bln	47,600,000	12 Bln	56,160,000	12 Bln	67,392,000	60 Bln	242,204,000	Sekrt.	KDI
							c Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya service kendaraan dan STNK	100%	1 Unit Roda 4	4,000,000	1 Unit Roda 4	5,000,000	6 Unit Roda 4, 16 Unit Roda 2	76,000,000	6 Unit Roda 4, 20 Unit Roda 2	80,000,000	6 Unit Roda 4, 20 Unit Roda 2	96,000,000	20 Unit Roda 4, 56 Unit Roda 2	261,000,000	Sekrt.	KDI	
								d Penyediaan jasa administrasi keuangan (Honorrarium Non PNS)	Terpenuhinya Honorarium Non PNS	100%	7 Non Pns	41,650,000	7 Non Pns	41,400,000	8 Non Pns	45,250,000	9 Non Pns	49,775,000	9 Non Pns	49,775,000	42 NOn PNS	227,850,000	Sekrt.	KDI
								e Penyediaan ATK	Tersedianya ATK	100%	1 Tahun	30,600,000	12 Bln	33,660,000	12 Bln	37,026,000	12 Bln	77,754,600	12 Bln	85,530,060	60 Bln	264,570,660	Sekrt.	KDI
							f Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	1 Tahun	24,000,000	12 Bln	26,400,000	12 Bln	29,040,000	12 Bln	31,944,000	12 Bln	35,138,400	60 Bln	146,522,400	Sekrt.	KDI	
								g Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedia Alat Listrik dan penerangan	100%	1 Tahun	3,000,000	12 Bln	3,300,000	12 Bln	3,630,000	12 Bln	3,993,000	12 Bln	4,392,300	60 Bln	18,315,300	Sekrt.	KDI
								h Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor (Peralatan dan bahan kebersihan)	Tersedianya Peralatan dan bahan kebersihan)	100%	1 Tahun	12,000,000	12 Bln	13,200,000	12 Bln	14,520,000	12 Bln	15,972,000	12 Bln	17,569,200	60 Bln	73,261,200	Sekrt.	KDI
							i Penyediaan makanan & minuman	Tersedianya makanan & minuman harian pegawai, rapat & tamu	100%	1 Tahun	46,400,000	12 Bln	51,040,000	12 Bln	56,144,000	12 Bln	61,758,400	12 Bln	67,934,240	60 Bln	283,276,640	Sekrt.	KDI	
								j Rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah	Jumlah PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah	100%	1 Tahun	115,150,000	12 Bln	149,695,000	12 Bln	194,603,500	12 Bln	252,984,550	12 Bln	328,879,915	60 Bln	1,041,312,965	Sekrt.	KDI
								k Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah	Jumlah PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah	100%	1 Tahun	6,000,000	12 Bln	7,800,000	12 Bln	10,140,000	12 Bln	13,182,000	12 Bln	17,136,600	60 Bln	54,258,600	Sekrt.	KDI

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
											Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022						
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target
										100%	komputer 2 unit, Laptop 1 unit, printer 2 unit	29,000,000	Laptop 2 Unit, Komputer 2 Unit	30,000,000	Komputer 2 Unit, Laptop 2 Unit	35,000,000	Laptop 2 Unit	20,000,000	Komputer 3 Unit	40,000,000	komputer 2 unit, printer 3 unit, Laptop 1 unit	154,000,000	Sekrt.	KDI	
			2	01	02		22	i	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	1 Tahun	15,000,000	12 Bln	18,000,000	12 Bln	21,600,000	12 Bln	25,920,000	12 Bln	31,104,000	60 Bln	111,624,000	Sekrt.	KDI
			2	01	02		24	j	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional(suku cadang dan bahan bakar)	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan operasional	100%	1 Tahun	150,690,000	12 Bln	180,828,000	12 Bln	216,993,600	12 Bln	260,392,320	12 Bln	312,470,784	60 Bln	1,121,374,704	Sekrt.	KDI
			2	01	02		30	k	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan & perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan Kantor	100%	12 Bln	11,000,000	12 Bln	13,200,000	12 Bln	15,840,000	12 Bln	19,008,000	12 Bln	22,809,600	60 Bln	81,857,600	Sekrt.	KDI
									Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Cakupan Disiplin Aparatur	0%	-	-	-	-	100%	31,500,000	-	-	-	-	100%	31,500,000		
			2	01	02			a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas dan perlengkapannya	0%	-	-	-	-	45 Pasang	31,500,000	-	-	-	-	45 Pasang	31,500,000	Sekrt.	KDI
									Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persetase Cakupan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	6%	25,000,000	23%	92,500,000	23%	92,500,000	23%	92,500,000	23%	92,500,000	100%	395,000,000		
			2	01	05	1		a	Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	0%	-	-	2 Org	30,000,000	2 Org	30,000,000	2 Org	30,000,000	2 Org	30,000,000	8 Org	120,000,000	Sekrt.	KDI
			2	01	05	3		b	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100%	2 Org	25,000,000	5 Org	62,500,000	5 Org	62,500,000	5 Org	62,500,000	5 Org	62,500,000	22 Org	275,000,000	Sekrt.	KDI
									Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	Cakupan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	100%	17%	40,080,000	18%	43,088,000	19%	46,396,800	21%	50,036,480	25%	59,040,128	100%	238,641,408	Sekrt.	KDI
			2	01	06			a	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Buku Laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	5 Dokumen	25,000,000	Sekrt.	KDI

		2	1	6			b	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Tersedianya Buku Laporan Keuangan SKPD	100%	1 Dokumen	30,080,000	1 Dokumen	33,088,000	1 Dokumen	36,396,800	1 Dokumen	40,036,480	1 Dokumen	44,040,128	5 Dokumen	183,641,408	Sekrt.	KDI
--	--	---	---	---	--	--	---	----------------------------------	--	------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	-------------	--------	-----

Tujuan	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
											Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
								Karya Infrastruktur	0%	-	-	1 Keg	250,000,000	1 Keg	300,000,000	1 Keg	360,000,000	1 Keg	432,000,000	4 Keg	1,342,000,000	Bid. Pentalatih	KDI	
		2	1	16			h Padat karya produktif	Terlaksananya Kegiatan Padat Karya Produktif	0%	-	-	1 Keg	170,000,000	1 Keg	204,000,000	1 Keg	244,800,000	1 Keg	293,760,000	4 Keg	912,560,000	Bid. Pentalatih	KDI	
		2	1	16			i Pemberdayaan tenaga kerja mandiri	Terlaksananya Kegiatan Pemberdaaan tenaga kerja mandiri	0%	-	-	1 Keg	125,000,000	1 Keg	150,000,000	1 Keg	180,000,000	1 Keg	216,000,000	4 Keg	671,000,000	Bid. Pentalatih	KDI	
		2	1	16			j Pelatihan Penciptaan Lapangan Kerja / Lapangan Usaha	Terlaksanaya pelatihan Penciptaan lapangan kerja / lapangan usaha	0%	1 Kegiatan	199,999,500	1 Kegiatan	219,999,450	1 Kegiatan	263,999,340	1 Kegiatan	316,799,208	1 Kegiatan	380,159,050	5 Kegiatan	1,380,956,548	Bid. Pentalatih	KDI	
	Menciptakan hubungan antar kepentingan dan lingkup industri yang harmonis	2	01	17			Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Cakupan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	100%													Bid. Syaker & HITK		
										7%	79,440,000	14%	170,328,000	23%	271,893,600	26%	310,522,320	30%	355,301,784	100%	1,187,485,704			
		2	1	17		02	a Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Teselesainya perselisihan hubungan industrial di perusahaan	100%	12 Bln	42,600,000	12 Bln	51,120,000	12 Bln	61,344,000	12 Bln	73,612,800	12 Bln	88,335,360	60 Bln	317,012,160	Bid. Syaker & HITK	KDI	
		2	1	17		09	b Pengembangan efektifitas Lembaga Dewan Pengupahan	Terlaksananya efektifitas lembaga dewan pengupahan kota Kendari	0%	12 Bln	36,840,000	12 Bln	44,208,000	12 Bln	53,049,600	12 Bln	63,659,520	12 Bln	76,391,424	60 Bln	274,148,544	Bid. Syaker & HITK	KDI	
		2	1	17		10	c Bimbingan teknis tata cara pembuatan perjanjian kerja penyusunan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama	Terlaksananya bimbingan teknik pembuatan PK, PP dan PKB	0%	0 Keg	-	1 Keg	75,000,000	1 Keg	82,500,000	1 Keg	90,750,000	1 Keg	99,825,000	4 Keg	348,075,000	Bid. Syaker & HITK	KDI	
		2	1	17		11	d Sosialisasi peraturan dan perundang - perundangan ketenagakerjaan	Terlaksananya Sosialisasi peraturan Perundang-undangan ketenaga kerjaan	0%	0 Keg	-	0 Keg	-	1 Keg	75,000,000	1 Keg	82,500,000	1 Keg	90,750,000	3 Keg	248,250,000	Bid. Syaker & HITK	KDI	

		2	01	15			Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Persentase Cakupan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	100%	0%	22%	125,000,000	24%	137,500,000	26%	151,250,000	29%	166,375,000	100%	580,125,000			
		2	01	15		06.	a Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	0%	0 Ken	-	1 Ken	125,000,000	1 Ken	137,500,000	1 Ken	151,250,000	1 Ken	166,375,000	4 Ken	580,125,000	bid.	KDI

Tujuan	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggun gjawab	Lokasi
											Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		2	01	01	19	03	c	Pengelolaan Sentra-Sentra IKM	Terlaksananya Pengelolaan/ pengoperasian Sentra IKM	0%	0 Tahun	-	1 Thn	100,000,000	1 Thn	120,000,000	1 Thn	132,000,000	1 Thn	145,200,000	4 Thn	497,200,000	Bidang Industri	KDI
		2	01	01	19	04	d	Pembuatan Naskah Akademik dan Penyusunan Peraturan Daerah serta Peraturan Walikota tentang industri	Tersediana Dokumen Naskah Akademik dan Peraturan Daerah serta Peraturan Walikota	0%	0 Dokumen	-	2 Dokumen	120,000,000	1 Dokumen	84,000,000	0 Dok	-	1 Dokumen	100,800,000	4 Dokumen	304,800,000	Bidang Industri	KDI
		2	01	01	19	05	e	Sosialisasi Peraturan-peraturan tentang Industri	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan-peraturan tentang Industri	0%	0 Kec	-	0 Kec	-	11 Kec	75,000,000	11 Kec	90,000,000	11 Kec	108,000,000	33 Kec	273,000,000	Bidang Industri	KDI
								Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	100%	0%	-	19%	300,000,000	23%	355,000,000	27%	420,500,000	32%	498,550,000	100%	1,574,050,000		
		2	01	01	17	01	a	Pembinaan Kemampuan teknologi industri Bidang IKAHH	Terlaksananya Pembinaan Kemampuan teknologi industri Bidang IKAHH	0%	0 Keg	-	1 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	55,000,000	1 Kegiatan	60,500,000	1 Kegiatan	66,550,000	4 Keg	232,050,000	Bid. IKAHH	KDI
		2	01	01	17	02	b	Pembinaan dan fasilitasi penerapan inovasi teknologi industri Bidang IKAHH	Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi penerapan inovasi teknologi industri Bidang IKAHH	0%	0 Keg	-	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	120,000,000	1 Kegiatan	144,000,000	1 Kegiatan	172,800,000	4 Keg	536,800,000	Bid. IKAHH	KDI
		2	01	01	17	03	c	Pembinaan dan fasilitasi pengembangan teknologi industri di bidang ILMEA	Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi pengembangan teknologi industri di bidang ILMEA	0%	0 Keg	-	1 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	60,000,000	1 Kegiatan	72,000,000	1 Kegiatan	86,400,000	4 Keg	268,400,000	Bid. ILMEA	KDI
		2	01	01	17	04	d	Pembinaan dan fasilitas Penerapan inovasi teknologi industri dibidang ILMEA	Terlaksananya Pembinaan dan fasilitas Penerapan inovasi teknologi industri dibidang ILMEA	0%	0 Keg	-	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	120,000,000	1 Kegiatan	144,000,000	1 Kegiatan	172,800,000	4 Keg	536,800,000	Bid. ILMEA	KDI

Kendari,

2018

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KOTA KENDARI

Ir. BENYAMIN SALEMPANG, M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19621106 198911 1 001